



Manajemen Keuangan Pendidikan Di Pondok Pesantren Darul Iman Aceh Tenggara

Haruddin

STIT Babussalam Aceh Tenggara

Email :

harudin.deku@yahoo.com

ABSTRACT

Penelitian ini merupakan suatu deskriptif tentang implementasi manajemen keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman Aceh Tenggara. Hasil dari penelitian ini berupaya untuk memberikan gambaran tentang konsep Islam dalam pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. Metode penelitian dalam memperoleh data digunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggungjawaban keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan yang dilaporkan kepada pimpinan, pengawasan bulanan khususnya dilakukan bendahara kepada Kyai. Bendahara melaporkan setiap laporan kegiatan yang menyangkut keuangan dari setiap kegiatan dan bagian, yang dilaporkan berupapembuktian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran kepada pihakpihak yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan bendahara kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman Aceh Tenggara. Sedangkan untuk operasional yang berasal dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikoreksi oleh masing-masing Kepala Sekolah Madrasah baik jenjang Aliyah maupun Tsanawiyah tanpa melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren dalam hal pengoreksian BOS dan langsung diserahkan kepada pemerintah. Hal yang utama dilakukan pembiayaan pendidikan Islam adalah dengan melibatkan seluruh komponen Pesantren dan madrasah dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Karena dengan melibatkan pihak-pihak komponen sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan maka akan ada solusi.

Keyword

Manajemen Keuangan, Pendidikan, Pesantren

PENDAHULUAN

Tujuan pendidikan adalah mengenalkan berbagai konsep untuk keberlangsungan hidup yang dicita-citakan. Hal ini merupakan salah satu fitrah yang esensial bagi manusia, karena pendidikan perspektif sosial pendidikan merupakan agen perubahan dengan mentransformasikan tata nilai. Di sinilah pentingnya pendidikan sebagai aset yang berharga yang perlu dilestarikan keberadaannya agar berkesinambungan. Keberlanjutan kegiatan dalam pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan faktor yang paling esensi adalah faktor biaya yang merupakan hal yang penting untuk kelangsungan hidup suatu lembaga pendidikan. Permasalahan tentang

mahalnya biaya pendidikan tinggi sangat dirasakan oleh masyarakat disatu sisi, tetapi disisi lain keinginan agar pelayanan yang diberikan pendidikan juga senantiasa selalu menjadi masalah yang belum tercapai untuk pemuasannya. Sepanjang sejarah mengenai finansial pendidikan sudah lama dibahas dan dicari solusinya agar pendidikan yang bermutu dapat dicapai.

Secara historis, umat Islam sudah memahami dengan baik tentang perlunya pembiayaan yang besar dan terorganisir guna membangun dan mengelola lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Salah satu sebagai contoh Nizham Al-Mulk mengeluarkan anggaran belanja yang luar biasa besarnya dalam membiayai pendidikan agar pendidikan berjalan dengan baik. Biaya yang dikeluarkan sebanyak 600.000 dinar atau lebih dari 100 trilyun setiap tahunnya dengan seluruh madrasah yang diasuh oleh negara dan biaya ini bukanlah biaya yang sedikit (Yunus, 1992). Masalah pendidikan yang kebanyakan dihadapi oleh bangsa pada ahir-ahir ini adalah berkaitan dengan: 1) sistem pengelolaan berbasis otonomi daerah, 2) pemborosan anggaran, 3) infrastruktur pendidikan yang masih belum merata, 4) guru, 5) perluasan dan pemerataan pendidikan, 6) kualitas, 7) *relevancy*, 8) pengelolaan anggaran, 9) manajemen kelembagaan pendidikan tinggi, 10) manajemen pendidikan tinggi (Gaffar, 2009). Mengenai pemerataan pendidikan diartikan sebagai pemerataan dalam memperoleh pendidikan. Hal ini berarti pihak penyelenggara pendidikan harus mencari alternatif sumber-sumber dalam pembiayaan pendidikan.

Perubahan zaman yang begitu cepat menuntut semua lini agar dapat melakukan adaptasi. Jika tidak, maka konsekwensi logis dari ketidakmampuan menyesuaikan diri akan menyebabkan ketertinggalan bahkan keterbelakangan. Demikian halnya apa yang dirasakan oleh pondok pesantren. Belakangan ini terjadi perubahan-perubahan di tubuh pesantren baik dari sisi manajemen, sistem pendidikan dan *out put* yang dihasilkan. Budaya 'konservatif' yang selama ini melekat dan identik pada pondok pesantren seperti kajian kitab-kitab klasik nampaknya harus mendapat saingan baru, ada yang tetap mempertahankan, ada yang sedikit mengurangi bahkan sampai tega meninggalkannya. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa beberapa tahun belakangan ini, pesantren menjadi lembaga pendidikan favorit di kalangan umat Islam, hal ini dapat dibuktikan dari tingginya minat masyarakat memasukkan anaknya ke pesantren. Di sisi yang lain per tumbuhan pesantren pada setiap tahunnya cukup menggembirakan. Sudah barang tentu kemajuan tersebut disertai dengan pengelolaan keuangan yang baik.

Manajemen keuangan adalah suatu proses melakukan kegiatan mengatur keuangan dengan menggerakkan tenaga orang lain. Kegiatan ini

dapat dimulaidari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Dalam manajemen keuangan di sekolah tersebut dimulai dengan perencanaan anggaran sampai dengan pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan. Menurut Depdiknas manajemen keuangan merupakan tindakan pengurusan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Dengan demikian, manajemen keuangan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggung jawaban keuangan dalam lembaga pendidikan itu sendiri (Sudrajat, 2003).

Manajemen pendidikan pesantren tidak jauh berbeda dengan manajemen pada umumnya. Manajemen pendidikan pesantren disebut juga manajemen pendidikan Islam. Pada pengelolaan manajemen pondok pesantren peran Kyai sangat besar dalam menentukan tujuan dan kegiatan manajerial yang harus dilakukan. Keadaan ini telah menjadikan hampir seluruh pengelolaan sumber daya baik finansial banyak ditangani langsung oleh Kyai atau oleh Keluarga Kyai dengan bantuan Ketua Pengurus (Santri) pondok pesantren. Peran yang dipercaya untuk melaksanakan kegiatan pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal lainnya dibawah naungan pendidikan pondok pesantren. Secara umum, kepengurusan dalam pondok pesantren terdiri dari kyai, pengurus pondok pesantren, pimpinan unit-unit kegiatan dan tenaga kesekretariatan pondok pesantren dan guru/ustadz sebagai tenaga pengajar. Pondok pesantren sebagai salah satu lembaga yang telah diakui oleh pemerintah. Merujuk pada Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pondok pesantren sebenarnya memiliki tempat yang istimewa.

Fungsi manajemen keuangan dalam pondok pesantren adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif dan efisien. Secara tegas tidak ada rumusan yang sama dan berlaku umum untuk fungsi manajemen. Salah satu pesantren tertua di Aceh Tenggara adalah pesantren Darul Iman Aceh Tenggara yang berada di desa Lawe Sumur. Pesantren ini masih aktif sampai sekarang bahkan merupakan salah satu pesantren yang menjadi pavorit di Aceh Tenggara. Sudah tentu keberadaan pesantren Darul Iman masih eksis sampai sekarang salah satu factor utamanya adalah termanej dengan baik keuangan pesantren.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2002). Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, berkaitan dengan substansi penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk mendapatkan data-data dilapangan. Dalam hal penelitian ini dilakukan wawancara dengan beberapa informan, diantaranya pimpinan pesantren Darul Iman yaitu Buya Bukhari Husni, MA. Ust. Swandi, S.Pd.i dan beberapa guru lainnya. Analisis data dilakukan dengan teori Hubermas dan Miles, dengan melakukan analisis dengan rangkaian Reduksi Data, Penyajian Data dan Verifikasi Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan Tinjauan Dalam Dinamika Pendidikan Islam

Islam dalam menyelenggarakan pendidikan, pembiayaan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan tersebut dibebankan dan menjadi tanggung jawab negara. Hal ini berarti pendidikan diselenggarakan pendidikan secara gratis bagi rakyatnya. Didalam islam, pemerintah berkewajiban untuk menjamin bagi setiap warganya dengan tiga kebutuhan pokok masyarakat, yaitu pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Mengenai penekanan tentang pendidikan dapat dilihat ketika umat mendapat tawanan ketika perang badar, sebagian tawanan yang tidak sanggup ditebus untuk pembebasannya maka para tawanan diwajibkan mengajarkan umat islam sepuluh anak-anak sebagai ganti tebusannya (Adiwarman, 2009).

Pada masa khalifah Umar dan Utsman, bagi para guru, muadzin, dan imam sholat jamaah diberikan gaji dari pendapatan baitul mal. Berdasarkan sejarah islam, kebijakan-kebijakan yang dilakukan para khalifah memberikan pelayanan pendidikan secara gratis bagi umat islam (Muhammad, 2002). Mulai pada abad IV H para khalifah membangun berbagai perguruan tinggi dengan berbagai fasilitas dan sarannya dan perpustakaan yang memadai. Perguruan tinggi yang didirikan dilengkapi dengan auditorium (Diwan), asrama dan perumahan para pendidik dan ulama. Perguruan tinggi yang terpenting diantaranya yang didirikan adalah madrasah Nizhamiyah dan Madrasah Al-Mustanshiriyah di Baghdad, Madrasah Al-Nuriyah di Damaskus, serta Madrasah An-Nashiriyah di Kairo. Hal ini memberikan gambaran bahwa pendidikan yang didirikan pada masa itu sudah tentu pembiayaannya sangat terorganisir dengan baik (Khalid, 1994).

Walau pendidikan yang diselenggarakan oleh negara secara gratis, tetapi negara tidak melarang bagi setiap rakyatnya untuk memberikan hartanya untuk pendidikan. khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam

pendidikan diantaranya dalam bentuk wakaf yang disyariatkan (Qahaf, 2005). Berdasarkan dari pemahaman ini, secara historis mengenai pembiayaan pendidikan telah dilaksanakan. Pendidikan merupakan objek dari kebijakan sosila, karena pendidikan islam yang dilenggerakan memberikan kontribusi terhadap baik dalam bidang pembangunan ekonomi dan akhlak generasi bangsa. Jadi pendidikan dapat berfaedah bagi individu dan masyarakat umum. Dapat disimpulkan bahwa dengan pendidikan akan menghantarkan suatu bangsa menuju kesejahteraan suatu bangsa, sehingga jika suatu bangsa mengalami kegagalan dalam membangun bangsa maka akan melahirkan berbagai permasalahan bangsa

Manajemen Pengelolaan Keuangan Pondok Pesantren Darul Iman Aceh Tenggara

1) Sumber Penerimaan Keuangan

Sumber penerimaan keuangan pendidikan dalam perencanaan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Iman bersumber murni dari SPP Santri. Di sisi lain, pesantren juga memiliki lahan pertanian sebagai bantuan untuk pesantren Darul Iman

2) Perencanaan Anggaran

Perencanaan manajemen keuangan adalah kegiatan dalam merencanakan sumber untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di Pondok Pesantren. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk komponen kegiatan. Di Pondok Pesantren Darul Iman ini perencanaannya dibuat setiap enam bulan sekali, biasanya dilaksanakan dibulan Juli dan Desember. Kegiatan perencanaan dilaksanakan rapat bersama pimpinan pondok pesantren, pengasuh/ustadz, dan pengurus pesantren. Perencanaan itu dibuat tata susulan-usulan dari semua pihak yang terkait berdasarkan pencapaian program kegiatan yang ada di pondok pesantren, dan juga kekurangan dari fasilitas yang ada di pondok pesantren, dengan cara membuat rencana kegiatan dan anggaran biaya pendidikan pondok pesantren. Untuk perencanaan jangka panjang di Pondok Pesantren Darul Iman ini belum membuatnya, seperti halnya untuk pembiayaan kegiatan peringatan hari besar Islam yang dimusyawarahkan ketika waktunya sudah dekat.

Pada dasarnya perencanaan anggaran ini digunakan untuk mempermudah dalam proses pengeluaran Pondok Pesantren. Didalam neraca anggaran ini ada sisi penerimaan atau pemasukan dana dan ada

sisi pengeluaran. Sehingga sumber dana atau sumber penerimaan biaya tersebut dituliskan komponen komponen yang menjadi kebutuhan di Pondok Pesantren. Adapun pengeluaran atau pengalokasian dana meliputi:

- a. Kebutuhan harian dan bulanan di pondok pesantren,
- b. Operasional kegiatan di pondok pesantren
- c. Sarana dan prasarana yang meliputi:

3) Pelaksanaan Anggaran

Dalam pelaksanaan anggaran di Pondok Pesantren Darul Iman disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh pihak pondok pesantren. Dalam pelaksanaan anggaran yaitu setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kiai/pimpinan pondok, kecuali anggaran rutin pondok pesantren. setiap pengeluaran keuangan tersebut haruslah disertai dengan adanya bukti-bukti yang kuat, misalnya: Nota(Kwitansi), dan selanjutnya ditulis dalam buku pengeluaran untuk dibuat laporan pertanggungjawaban di akhir bulannya.

Membuat laporan keuangan merupakan suatu keharusan bagi bendahara Pondok Pesantren Darul Iman. Setiap laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara, akan diserahkan kepada kiai kemudian setelah mendapatkan pengesahan dari kiai, bendahara menyerahkan kepada bendahara yayasan pondok pesantren Pondok Pesantren Darul Iman, setelah itu menyampaikan lagi laporan keuangan pondok pesantren kepada masyarakat lewat forum pengajian. Dengan hal ini maka semua akan jelas bahwa keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman ada kekurangan atau tidaknya, dalam pelaksanaan kegiatannya jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama ataupun tidak sesuai dengan anggarannya (karena sesuai kondisi pada saat transaksi) bisa kurang atau lebih dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi keuangan yang tidak sama dengan anggaran terutama yang cukup besar perbedaannya, sehingga kalau ada kekurangannya dari semua pihak yang terkait akan melakukan sebuah evaluasi bersama dan mencari penyelesaian bersama sama.

Dalam hal ini pemimpin Pondok Pesantren Darul Iman, bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam mengefektifkan pembuatan anggaran belanja di Pondok Pesantren. Kegiatan untuk membuat anggaran belanja bukanlah suatu pekerjaan rutin, melainkan melibatkan pertimbangan pertimbangan serta maksud dari pada program pendidikan. Anggaran dasar koordinasi pelaksanaan dan pengendalian

adalah semua hal yang berkaitan dengan lalul intas dana, baik dana yang masuk maupun yang keluar harus didasarkan pada bukti yang kuat, perintah tertulis dan rekapan pertanggungjawaban atas anggaran yang sudah dilaksanakan, dalam bentuk LPJ (Laporan Pertanggungjawaban)serta laporan(Bukti transaksi) akan menjadi pijakan untuk melakukan audit.Di dalam format anggaran terdiri dari dua sisi yaitu sisipenerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan atau perolehan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana. Kemudian sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai.

Dari seluruh penerimaanbiaya, sebagian dipergunakan untuk membiayai kegiatan administrasi. Anggaran di samping sebagai alat perencana danpengendalian jugamerupakan alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Oleh karena itu anggaran jugadapat berfungsi sebagai alat atau tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada dasarnya pelaksanaan anggaran di Pondok Pesantren Darul Iman sudah dilakukan dengan baik,akan tetapi terkadang dalam pelaksanaannya masih terdapat kekeliruan-kekeliruan di dalam menganggarkan jumlah dana yang ada dari perencanaan yang sudah direncanakan oleh pihak terkait pondok pesantren.

4) Evaluasi atau Pelaporan

Kegiatan yang terpenting dan yang terakhir dalam mengelola keuangan di Pondok Pesantren adalah evaluasi (pelaporan). Evaluasi keuangan merupakan suatu kewajiban atau keharusan yang paling penting. Dengan adanya evaluasi ini akan memudahkan dalam pemantauan kondisi di Pondok Pesantren Darul Iman. Dimana evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah program Pondok Pesantren mencapai sasaran yang diharapkan. Evaluasi ini menekankan pada aspek hasil *output*), konsekuensinya evaluasi baru dapat dilakukan jika program Pondok Pesantren sudah berjalan satu periode sesuai dengan tahapan sasaran yang dirancang.Yang mana kegiatan evaluasi (pelaporan) yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Iman ini dilakukan setiap enam bulan sekali di bulan Juli dan Desember. Kegiatan evaluasi (pelaporan) dibuat dan dilakukan oleh bendahara pondok pesantren, diserahkan kepada lurah pondok kemudian setelahmen dapatkan pengesahan dari lurah pondok, bendahara menyerahkan

kepada bendahara yayasan Pondok Pesantren Darul Iman untuk disampaikan kepada pimpinan yayasan dan menyampaikan lagi laporan keuangan pondok pesantren kepada masyarakat lewat forum pengajian.

Disamping membuat laporan pada setiap enam bulansekali bendahara juga membuat laporan bulanan untuk pedoman pembuatan laporan enam bulan sekali. Dimana laporan bulanan ini berisi pemasukan dana dan pengeluaran yang setiap harinya dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Pembukuan di Pondok Pesantren Darul Iman dilakukan setiap saat bersamaan dengan dana yang masuk dan keluar dengan tujuan agar dana-dana tersebut dapat diketahui kemana alurnya. Pembukuan dilakukan secara cermat dan teliti, sederhana dan praktis.

Dalam sebuah manajemen keuangan pasti mengalami hambatan-hambatan, hambatan pada manajemen keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman ini diantaranya, tidak menentunya pemasukan keuangan pondok pesantren. Hal ini menjadi hambatan dalam manajemen keuangan di pondok pesantren, karena Pondok Pesantren Darul Iman ini, sumber pemasukan biaya untuk membiayai pendidikan di pondok pesantren hanya dari donator tidak tetap dan dari unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren dan SPP santri. Sedangkan untuk madrasah yang dikelola salah satu sumber dananya adalah dana BOS. Apabila hasil dari unit usaha yang dimiliki oleh pondok pesantren mengalami penurunan, otomatis pemasukan dana untuk biaya pendidikan di pondok pesantren berkurang. Hal ini mempengaruhi proses manajemen keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman menjadi lambat. Demikian juga halnya dengan sumber dana lainnya, karena tidak semuanya santri yang mondok berasal dari kalangan orang yang berduit. Kemudian solusi untuk menyelesaikan hambatan tersebut, maka dari penerimaan dana tersebut dialokasikan ke suatu hal atau kegiatan yang bersifat penting dan sangat mendesak. Jadi pengurus pondok pesantren harus dapat mengambil keputusan kebutuhan manayang utama dan yang lebih penting didahulukan.

Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam: Pondok Pesantren

Manajemen keuangan pondok pesantren adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan penataan sumber, penggunaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan di Pondok Pesantren atau lembaga pendidikan. Sebagaimana yang tertuang dalam PP nomor 48 Tahun 2008 tentang pengelolaan dana pendidikan, pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Dalam hal ini manajemen

keuangan pondok pesantren Pondok Pesantren Darul Iman meliputi: penyusunan anggaran yang dapat disebut dengan perencanaan biaya pendidikan, pembukuan yang termasuk dalam pelaksanaan biaya pendidikan dan evaluasi atau pelaporan yang termasuk dalam pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan manajemen keuangan pondok pesantren.

Dalam merencanakan anggaran di Pondok Pesantren Darul Iman ini mempunyai konsep tersendiri dari pondok pesantren, konsep tersebut di buat oleh pihak pondok pesantren secara langsung yang sudah didasarkan atas musyawarah dan rapat dengan pihak yang bersangkutan dengan pondok pesantren yang kemudian dibentuklah rencana anggaran dan pendapatan. Di Pondok Pesantren Darul Iman ini perencanaannya dibuat setiap enam bulan sekali dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Desember, bersama pimpinan pondok pesantren, pengasuh/kiai, dan pengurus pesantren. Perencanaan itu dibuat atas usulan-usulan dari semua pihak yang terkait berdasarkan pencapaian program kegiatan yang ada di pondok pesantren, dan juga kekurangan dari fasilitas yang ada di pondok pesantren. Dengan cara membuat rencana kegiatan dan anggaran biaya pendidikan pondok pesantren.

Untuk perencanaan jangka panjang di Pondok Pesantren Darul Iman ini belum membuatnya, seperti halnya untuk pembiayaan kegiatan peringatan hari besar Islam yang dimusyawarahkan ketika waktunya sudah dekat. Perencanaan manajemen keuangan adalah kegiatan dalam merencanakan sumber untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di Pondok Pesantren. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang berhubungan dengan anggaran sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk komponen kegiatan. Dalam prosesnya dapat berjalan secara efektif dan terhindar dari berbagai penyalahgunaan yang berdampak pada terhambatnya proses pendidikan, sehingga tujuan pendidikan tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Tanpa perencanaan yang matang, pelaksanaan pendidikan yang sesuai dengan perencanaan, disertai dengan pertanggungjawaban dengan baik, maka sulit diharapkan pendanaan pendidikan yang sumbernya terbatas akan mampu mendukung berjalannya proses pendidikan secara efektif.

Dalam pelaksanaan anggaran di Pondok Pesantren Darul Iman disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat oleh pihak pondok pesantren. Dalam pelaksanaan anggaran yaitu setiap dana yang keluar harus disetujui oleh kiai/pimpinan pondok, kecuali anggaran rutin pondok pesantren. Setiap pengeluaran keuangan tersebut haruslah disertai dengan adanya bukti-bukti yang kuat, misalnya: Nota (Kwitansi), dan selanjutnya

ditulis dalam buku pengeluaran untuk dibuat laporan pertanggungjawaban di akhir bulannya. Adapun pengeluaran atau pengalokasian dana meliputi:

- a. Kebutuhan harian dan bulanan di pondok pesantren,
- b. Operasional kegiatan di pondok pesantren

Dalam pelaksanaan kegiatannya jumlah yang direalisasikan bisa terjadi tidak sama ataupun tidak sesuai dengan anggarannya (karena sesuai kondisi pada saat transaksi) bisa kurang atau lebih dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi keuangan yang tidak sama dengan anggaran terutama yang cukup besar perbedaannya, maka harus adanya analisis tentang sebab-sebabnya dan apabila diperlukan, dapat diadakan revisi anggaran agar tidak terjadi kekeliruan sehingga anggaran dapat tetap berjalan. Komunikasi dan koordinasi adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien. Dalam hal ini pemimpin pondok pesantren sangat bertanggungjawab sebagai pelaksana dalam mengefektifkan pembuatan anggaran belanja di pondok pesantren. Kegiatan untuk membuat anggaran belanja bukanlah suatu pekerjaan yang rutin, melainkan melibatkan pertimbangan-pertimbangan serta maksud dari pada program pendidikan.

Pada umumnya dalam penyusunan laporan keuangan dilakukan tiap akhir tahun pembukuan. Namun kegiatan evaluasi (pelaporan) yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darul Iman ini dilakukan setiap enam bulan sekali dilaksanakan pada bulan Juli dan bulan Desember. Kegiatan evaluasi (pelaporan) dibuat dan dilakukan oleh bendahara pondok pesantren, diserahkan kepada lurah pondok kemudian setelah mendapatkan pengesahan dari lurah pondok, bendahara menyerahkan kepada bendahara yayasan Pondok Pesantren Darul Iman untuk disampaikan kepada pimpinan yayasan dan menyampaikan lagi laporan keuangan pondok pesantren kepada masyarakat lewat forum pengajian.

Disamping membuat laporan pada setiap enam bulan sekali bendahara juga membuat laporan bulanan untuk pedoman pembuatan laporan enam bulan sekali. Dimana laporan bulanan ini berisi pemasukan dana dan pengeluaran yang setiap harinya dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan pondok pesantren. Pembukuan di Pondok Pesantren Darul Iman dilakukan setiap saat bersamaan dengan dana yang masuk dan keluar dengan tujuan agar dana-dana tersebut dapat diketahui kemana alurnya. Pembukuan dilakukan secara cermat dan teliti, sederhana dan praktis. Pelaksanaan keuangan ialah kegiatan berdasarkan rencana yang telah dibuat dan kemungkinan terjadi penyesuaian bila diperlukan. Pelaksanaan dalam manajemen keuangan terbagi atas proses pengelolaan dan penerimaan.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pondok Pesantren

Pertanggungjawaban keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan yang dilaporkan kepada pimpinan, pengawasan bulanan khususnya dilakukan bendahara kepada Kyai. Bendahara melaporkan setiap laporan kegiatan yang menyangkut keuangan dari setiap kegiatan dan bagian, yang dilaporkan berupa pembuktian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan bendahara kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman. Sedangkan untuk operasional yang berasal dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikoreksi oleh masing-masing Kepala Sekolah Madrasah.

Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman di buat dalam bentuk Laporan pertanggungjawaban yang diserahkan kepada Pimpinan Pondok Pesantren sebagai pembuktian penerimaan maupun pembayaran yang sudah dilakukan, sedangkan pada operasional madrasah pelaporan dana dari pemerintah melibatkan kepala sekolah langsung berserta Tata Usaha dan bendahara untuk melaporkannya ke Pemerintah tanpa melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren. Maka Bendahara Pondok yang lebih selektif untuk mencairkan uang tersebut. Setiap kegiatan yang dilakukan langkah selanjutnya adalah membuat Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ). Membuat LPJ merupakan suatu keharusan bagi setiap bagian yang ada di Pondok Pesantren dan Madrasah, setiap LPJ dari masing-masing bagian nantinya akan di audit oleh bendahara, dan hasilnya kemudian diserahkan kepada Kyai Pondok Pondok Pesantren Darul Iman dan disimpan sebagai dokumentasi bendahara.

Kepala Madrasah saja yang mengevaluasi hasil audit yang berkenaan dengan dana Madrasah. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada dewan guru dan staf sekolah. Dalam hal ini manajemen keuangan pondok pesantren meliputi penyusunan anggaran yang dapat disebut dengan perencanaan biaya pendidikan, pembukuan yang termasuk dalam pelaksanaan biaya pendidikan dan evaluasi atau pelaporan yang termasuk dalam pelaksanaan pengawasan atas pelaksanaan manajemen keuangan pondok pesantren.

Dalam pelaksanaan kegiatannya jumlah yang direalisasikan bisaterjadi tidak samaataupun tidak sesuai dengan anggarannya (karenasesuai kondisi pada saat transaksi) bisakurang atau lebih dari jumlahyang dianggarkan. Realisasi keuangan yang tidak samadengananggaran terutama yang cukup besar perbedaannya, maka harus adanyaanalisis tentang sebab-sebabnya dan apabila diperlukan, dapat diadakanrevisi anggaran agar tidakterjadi kekeliruan sehingga anggaran dapattetap berjalan. Komunikasi dan koordinasi adalah hal-hal yang wajib dilaksanakan demi terlaksananya pelaksanaan anggaran yang optimal, tepat waktu, efektif dan efisien. Dalam hal ini pemimpin pondok pesantren sangat bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam mengefektifkan pembuatan anggaran belanja jadi pondok pesantren. Kegiatan untuk membuat anggaran belanja bukanlah suatu pekerjaan yang rutin, melainkan melibatkan pertimbangan-pertimbangan sertamaksud dari setiap program pendidikan.

Inisiatif Pembiayaan Pendidikan Islam

Sebagian lembaga pendidikan islam pada umumnya, permasalahan yang menjadi penghambat jalannya proses pendidikan adalah mengenai pembiayaan pendidikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan tahun 2006 tentang pembiayaan pendidikan di madrasah maka didapatkan hasil penelitian bahwa kesulitan yang dihadapi oleh madrasah mengenai pengelolaan finansial pendidikan adalah persoalan penggalan dimana dana diperoleh. Dalam hal ini yang menjadi kendala utama dalam penggalan dananya adalah terbatasnya sumber biaya yang dapat digali. Yang menjadi sumber utama dalam pembiayaan pendidikan operasional selama ini adalah rata-rata diperoleh dari iuran SPP dari siswa. Biaya pendidikan yang diperoleh dari iuran SPP siswa merupakan sumber pembiayaan pendidikan tetap, walaupun terkadang iuran ini tidak mampu membayar sepenuhnya biaya operasional madrasah. Intinya adalah iuran SPP yang diperoleh dari siswa harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dimana madrasah itu menyelenggarakan pendidikan.

Dengan kehadiran kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan untuk semua sekolah dan madrasah untuk membantu permasalahan pembiayaan pendidikan sekolah, namun dilihat dari realita lapangan tetap saja tidak dapat menutupi pembiayaan operasional pendidikan yang diperlukan. Sumber dana lain juga diperoleh dari masyarakat dalam bentuk ZIS, tetapi sumber dana ini merupakan sumber tidak tetap dan tidak dapat dipastikan keberadaannya. Demikian juga halnya sumber dana yang diperoleh dari perusahaan atau pemerintah daerah, tetapi pihak sekolah harus mengajukan permohonan dalam bentuk proposal yang jawabannya tidak dapat

dipastikan. Dalam hal ini, harus ada faktor pendekatan yang dilakukan oleh penyelenggara madrasah dengan pihak yang memberikan dana, jadi jika madrasah tidak memiliki akses maka sudah dapat

Permasalahan pembiayaan pendidikan juga dapat dilihat dari sisi persoalan SDM yang belum memadai, dimana pemahaman mengenai pengaturan dan pengelolaan pembiayaan masih minim juga dalam menganalisis dana yang diperoleh. Disisi lain masalah yang dihadapi oleh lembaga penyelenggara pendidikan adalah rendahnya dukungan di masyarakat, hal ini dihadapi karena kurangnya pihak lembaga pendidikan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. Disisi lain karena pihak masyarakat beranggapan bahwa sekolah sudah dibiayai oleh pemerintah, maka masyarakat beranggapan seharusnya sekolah sudah mandiri dan tidak perlu lagi dibantu dalam hal biaya. Permasalahan-permasalahan ini semua yang membuat pihak madrasah kewalahan dalam pengelolaan pendidikan. Intinya adalah jika biaya untuk operasional bermasalah maka akan melambatkan pergerakan kemajuan pendidikan.

Jika dianalisis mengenai permasalahan pembiayaan pendidikan islam ini, maka hal ini cukup dilematis. Dengan demikian perlu langkah-langkah yang strategis direncanakan dalam pemecahannya. Hal yang utama dilakukan adalah dengan melibatkan seluruh komponen madrasah dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Karena dengan melibatkan pihak-pihak komponen sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan maka akan ada solusi. Selama ini kebiasaan penyelenggara pendidikan, jika masalah pembiayaan maka hanya sekelompok kecil dari madrasah yang ikut mengelola atau bahkan hanya satu pihak saja. Dengan melibatkan seluruh komponen madrasah maka akan ada rasa tanggung jawab seluruh pihak madrasah.

Jika dilihat secara umum mengenai bantuan pemerintah maka tidak akan dapat memenuhi secara utuh masalah pembiayaan pendidikan islam. Oleh karena itu pihak kepala madrasah sebagai motor penggerak jalannya madrasah, diharapkan mempunyai keterampilan kewirausahaan dan kemampuan manajerial serta kesupervisian. Jika dilihat dari perkembangan sejarah pendidikan islam, maka masalah pembiayaan tidak menjadi masalah bagi lembaga pendidikan. Karena jika diperhatikan perkembangannya, pihak penyelenggara pendidikan tidak bersifat konsumtif, tetapi produktif. Jadi, pihak sekolah harus mampu memberikan rasa percaya masyarakat bahwa lembaga pendidikan merupakan lembaga untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang terampil. Jika pihak masyarakat memberikan rasa percaya maka pihak sekolah membuat lembaga tersendiri dalam mengelola waqaf masyarakat untuk lembaga pendidikan atau sedeqah, infak dan zakat.

Waqaf atau zis yang diperoleh dikelola secara produktif menjadi usaha, dengan demikian hasil keuntungan yang diperoleh dapat digunakan untuk pendidikan tanpa mengurangi harta pokok yang diwaqafkan

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban keuangan di Pondok Pesantren Darul Iman dalam bentuk laporan bulanan dan tahunan yang dilaporkan kepada pimpinan, pengawasan bulanan khususnya dilakukan bendahara kepada Kyai. Bendahara melaporakan setiap laporan kegiatan yang menyangkut keuangan dari setiap kegiatan dan bagian, yang dilaporkan berupa pembuktian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran kepada pihak-pihak yang bersangkutan yang kemudian dilaporkan bendahara kepada Pimpinan Pondok Pesantren Darul Iman. Sedangkan untuk operasional yang berasal dari pemerintah seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikoreksi oleh masing-masing Kepala Sekolah Madrasah baik jenjang Aliyah maupun Tsanawiyah tanpa melibatkan Pimpinan Pondok Pesantren dalam hal pengoreksian BOS dan langsung diserahkan kepada pemerintah. Hal yang utama dilakukan pembiayaan pendidikan Islam adalah dengan melibatkan seluruh komponen Pesantren dan madrasah dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan. Karena dengan melibatkan pihak-pihak komponen sekolah dalam penyelenggaraan pembiayaan pendidikan maka akan ada solusi

DAFTAR PUSTAKA

- Yunus, Mahmud, 1992, *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Hidakarya Agung.
- Al-Mubarakfuri, Adiwarmann (Ed.), 2009. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: IIT.
- Khalid, Abdurrahman Muhammad, 1992. *Soal Jawab Seputar Gerakan Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.
- Qahaf, Mundzir, 2005. *Manajemen Wakaf Produktif (Al-Waqf Al-Islami Tathawwurahu Idaratuhu Tanmiyatuhu)*, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, Jakarta: Khalifa.
- Nasution, Edwin M dan Hasanah U, 2003. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: PSTTI-UI.
- M. Fakry Gaffar, 2009. *Pembiayaan Pendidikan Nasional*, Handout Perkuliahan Pembiayaan Pendidikan PPS Program Doktor Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- Akhmad Sudrajat, 2013. *Konsep dasar manajemen keuangan sekolah*, Jakarta: Pustaka Rizki Putra.